

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)**

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



DISUSUN OLEH :

KOSIB BURANDA
1710012111047

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 05/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021

Nama : **Kosib Buranda**
NPM : **1710012111047**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Kewenangan Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.**

Telah disetujui Pada hari **Rabu** tanggal **Sebelas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Satu** dan dinyatakan **LULUS**.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

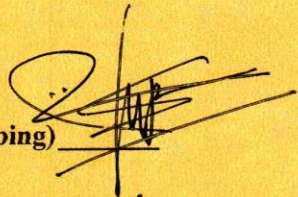
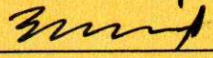
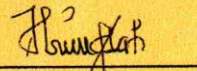
PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No : 05/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021

Nama : Kosib Buranda
NPM : 1710012111047
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Tata Negara pada Hari **Jum'at** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.** (Anggota) 
3. **Dr. Maiyestati, S.H., M.H.** (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**PELAKSANAAN KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK. (GOOD GOVERNANCE)**

**Kosib buranda¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : kosibburanda03@gmail.com**

ABSTRAK

Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mengawasi Pelayanan Publik baik diselenggarakan oleh negara dan pemerintahan termasuk diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008. Dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah pelaksanaan Hak dan Kewajiban Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam melaksanakan kewenangannya untuk mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)? (2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)? (3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam penegakan pengawasan pelayanan publik untuk mewujudkan *clean governance*? Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Sosiologis, terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, hasil penelitian menunjukkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mempunyai kewenangan yang mutatis mutandis dengan Ombudsman Republik Indonesia pusat, yang dijalankan berdasarkan UU Nomor 37 tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, dan PP Nomor 21 Tahun 2011, namun pelaksanaannya belum optimal. delapan puluh persen, maladministrasi dan pungli di kota padang, laporan di selesaikan berdasarkan peraturan Ombudsman Republik Indonesia No 26 Tahun 2017.

Kata Kunci : Kewenangan, Ombudsman, Good Governance

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	7
4. Metode Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Ombudsman RI	
1. Pengertian Ombudsman.....	12
2. Tujuan dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia.	12
3. Fungsi, Tugas Wewenang Ombudsman Republik Indonesia.....	14
B. Tinjauan tentang Ombudsman RI Perwakilan Sumatera barat	
1. Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat	16
2. Tujuan di bentuknya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat	17
C. Tinjauan Tentang asas –asas pemerintahan yang baik	
1. Pengertian Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang baik	18
2. Pengertian wewenang menurut KBBI.....	20
3. Tujuan dan manfaat Prinsip-Prinsip pemerintahan yang baik (Good governance)	21
4. Asas Prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik	22
5. Manfaat Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik.....	25
6. Fungsi Tugas Wewenang Suatu Pemerintahan yang baik	25
D. Tinjauan Tentang Tata Kelolah Pemerintahan yang baik	
1. Pengertian Tata kelolah pemerintahan yang baik	30
2. Tujuan dari Tata kelolah pemerintahan yang baik.....	31
3. Fungsi dari Tata kelolah Pemerintahan yang baik	31

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)32
- B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik (Good Governance)49
- C. Upaya Yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam Penegakan Pengawasan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan *Clean Governance*59

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan71
- B. Saran.74